

Potensi Kepemimpinan Masyarakat Tradisional di Indonesia

H.A. Mattulada

Pendahuluan

AKHIR-AKHIR ini masyarakat tradisional di pedesaan Indonesia sedang bergerak ke arah satu perubahan yang sukar diramalkan proses kelanjutannya. Kita biasanya terpaku pada gambaran hidup pedesaan "tempo doeloe" yang berada dalam suasana aman tenteram, tanpa pergolakan. Suatu kehidupan masyarakat dengan warganya hidup rukun, damai tanpa saling sengketa. Suatu *paguyuban* yang tenang dalam kerukunan hidup kekeluargaan, suatu suasana pedesaan tradisional. Masyarakat pedesaan tradisional seperti itu pada masa kini sudah sukar ditemukan.

Perubahan-perubahan baik pada bentuk atau struktur maupun pada fungsi-fungsi kelembagaan pedesaan tradisional, telah menghasilkan berbagai keadaan yang mengubah rona atau wajah masyarakat "desa" menjadi tempat-tempat pemukiman penduduk yang tidak lagi memiliki semangat *paguyuban* atau *republik*-nya.

Apa yang menyemangati wilayah pemukiman yang disebut "desa" di luar Pulau Jawa dewasa ini, adalah semata-mata semangat administrasi atau birokrasi "kepejabat-an" yang lesu. Ada sesuatu yang hilang, yakni makna kekukuhan tradisi kerakyatan dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas tradisi kehidupan masyarakat dahulu yang disebut *wanua*, atau *bori* di Sulawesi-Selatan, kampung atau nama lainnya dalam kehidupan masa lalu di luar Pulau Jawa.

Kini semangat dari satuan-satuan masyarakat persekutuan adat atau masyarakat sejenis "desa" di seluruh wilayah tanah air Indonesia, mengalami perubahan-perubahan yang amat mendalam dan mendasar. Proses pembentukan desa-desa seragam di seluruh Indonesia adalah sesuai dengan kehendak Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan-perubahan mendasar itu terjadi terutama di luar Pulau Jawa. *Sebab-sebab* perubahan itu terutama dirasakan sebagai *perusakan* kelembagaan tradisional yang berlatar belakang kultural

yang secara mendasar berbeda dari tradisi kehidupan pedesaan di Pulau Jawa, yang menjadi rujukan utama Undang-Undang Pemerintahan Desa itu. Undang-undang itu diperlakukan sama untuk seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia yang sebenarnya memiliki segala macam sifat kemajemukan sebagai hakikat keberadaan empiris.

Kini kita memiliki "desa" yang secara administratif sama atau seragam pada "permukaan" di seluruh Indonesia. Ia dapat dikatakan sebagai kemajuan di dalam penguasaan yang seragam dan membawa kemudahan praktis bagi pemerintahan atasan. Tetapi sebenarnya desa-desa itu telah kehilangan nilai-nilai dan gagasan-gagasan kultural yang terdapat dalam struktur dan fungsi kelembagaan tradisional yang secara formal harus ditinggalkannya.

Cara-cara terbentuknya kepemimpinan dalam wilayah-wilayah persekutuan adat sejenis "desa" tempo-doele itu, sudah sukar ditemukan, karena cara terangkatnya seorang Kepala Desa dengan Undang-Undang Pedesaan itu sudah tertentu tata-caranya dan diberlakukan secara seragam untuk seluruh Indonesia. Dilihat dari sudut penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang itu, sesungguhnya telah berlangsung satu proses *penyeragaman* secara hukum formal yang mengacu pada satu *pola tertentu*. Inilah gambaran suatu proses rekayasa sosial melalui kekuatan hukum.

Adapun untuk kepentingan pencatatan kekayaan rohaniah berupa gagasan atau nilai yang terdapat dalam sistem budaya bangsa Indonesia, yang biasanya menjadi acuan strategis penggalan potensi kepemimpinan dalam masyarakat *tradisional* atau *pedesaan*, dapat kita lihat adanya *aneka macam cara* yang terdapat dalam tradisi masyarakat bersangkutan. Hal-hal itu amat dipe-

ngaruhi oleh landasan pertumbuhan masyarakat yang muncul sebagai gagasan, nilai-nilai dan pikiran-pikiran pokok yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku warga masyarakat. Hal tersebut ditemukan dalam alam pikiran, ideologi atau kepercayaan yang dialami oleh umat manusia, seperti pengaruh: (1) alam pikiran Mitis; (2) alam pikiran Ontologis; dan (3) alam pikiran Fungsional, yang menjadi acuan perilaku manusia pendukungnya.¹

Memang sangat erat hubungan antara mitos atau kriteria rakyat tentang terjadinya negeri atau persekutuan hidup dengan proses terjadinya kepemimpinan dalam persekutuan hidup itu. Mitos juga ikut menjadi acuan bagi terselenggaranya masyarakat yang tersusun melalui hubungan-hubungan yang terkait pada faktor *genealogis*, *territorial* dan *fungsional spesial*. Pada acuan-acuan ini secara teoretis dapat ditelusuri kembali cara pembentukan potensi kepemimpinan dalam masyarakat. Data-data yang terdapat dalam khasanah kebudayaan (suku-suku) Bangsa Indonesia, niscaya dapat memperkaya wawasan kita untuk menjadi milik nasional yang dapat dipergunakan sebagai bahan strategis dalam membangun potensi kepemimpinan bangsa Indonesia di masa depan.

Tentu saja tak dapat dipungkiri adanya pandangan yang mencela pendapat untuk mempertimbangkan kembali tradisi lama sebagai rujukan bagi penataan masyarakat Indonesia Merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pandangan demikian itu didasarkan pada prinsip para pemimpin Bangsa Indonesia yang meletakkan Dasar Negara Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Dasar, sebagai negara ber-

¹C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1976), 34, 55, 85.

dasarkan konsep pemikiran Barat modern. Republik Indonesia adalah negara dengan masyarakat baru. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat Feodal masa lalu, zaman pra-Indonesia. Mungkin pikiran demikian itu benar secara strategis dan berdasarkan pemikiran rasional teoretis. Akan tetapi, apa yang ada dalam kenyataan masyarakat dewasa ini *secara empiris* memberikan ceritera yang berbeda dari pemikiran itu. Kenyataan empiris itu tidak mungkin ditiadakan begitu saja, atau meloncatkannya kepada suatu keadaan yang lain, tanpa risiko yang besar dan berbahaya terhadap apa yang dicita-citakan.

Pola Umum Tradisi Kepemimpinan Nusantara "Tempo Doeloe"

Ada pendapat yang mencoba mengidentifikasi pola kepemimpinan yang terdapat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Menurut Mochtar Naim, ada dua macam pola kepemimpinan di Nusantara ini, yaitu pola Jawa dan pola Melayu.²

Pola Jawa (J) merupakan pola kepemimpinan Nusantara yang berpangkal pada paham sinkretistik. Kepemimpinan ini amat menjunjung tinggi keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pola seperti ini dapat pula disebut *Pola Paku Buana*, karena dalam pola ini segala sesuatu harus dilihat dari sudut keserasian antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara raja dengan rakyat. Pola ini didukung oleh anggapan bahwa pemangku kekuasaan menerima kekuasaan itu secara utuh dari sumber datangnya kekuasaan. Sumber kekuasaan ini adalah sesuatu yang adikodrati dan tidak dapat

dipersoalkan, serta tertutup dari kemungkinan digugat atau ditolak legitimasinya. Dalam pola ini hanya dikenal mufakat sebagai acuan dari permusyawaratan.

Pemangku kekuasaan (orang) adalah identik dengan kekuasaan itu sendiri.³ Kekuasaan yang dimaksud di sini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Selain itu, tidak diperlakukan pula oposisi terhadap kekuasaan itu. Pola pengendalian yang dianut memberi pengayoman kepada segenap wilayah kesatuan dalam kekuasaan yang tunggal. Dengan cara itu, segenap kekuasaan bawahan (wilayah) berada dalam kepatuhan total. Warna-warna lain yang terdapat sebagai kelainan yang mencolok, tidak dapat diberi kesempatan untuk menunjukkan kesemarakan, karena hal itu akan berarti pendurhakaan kepada kekuasaan.

Mochtar Naim memberikan rincian sifat-sifat kepemimpinan dalam pola Jawa yang paternalistis, etatis dan sentripetal konsentris ini. Dalam upaya mencapai kemakmuran, segi pendekatan keamanan dan kestabilan lebih diutamakan daripada keterbukaan dan demokratisasi. Kritik kurang disukai. Menurut Mochtar Naim, keadaan seperti yang mengikuti pola Jawa telah berlangsung sejak diberlakukannya Dekrit Presiden No. 5 Tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945, sampai saat ini. Yang menonjol dan yang dimanfaatkan adalah budaya daerah yang berpola *Paku Buwana*. Selain ciri-ciri itu juga ditunjukkan kuatnya praktek-praktek kekuasaan yang bersifat vertikal, hierarkis, birokratis, formalistis, uniformistis, otoriter, feodalistis, tradisionalistis, konservatif,

²Mochtar Naim, *Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional*, satu makalah untuk Kongres Kebudayaan, 1991, 9.

³Benedict Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture," dalam *Culture and Politics in Indonesia*, Claire Holt (Ed.) (Ithaca: Cornell University Press), 3-70.

serimonialistis, sinkretis, monistis animistis, mistikal, estetis dan sebagainya.

Pola Melayu (M) merupakan kepemimpinan Nusantara yang berpangkal pada sifat sintetis, yang lahir dari suasana konflik dan integrasi. Pola kepemimpinan seperti ini dapat disebut *Pola Menjinjing Alam*. Dalam pola ini terdapat dua komponen yang berlawanan secara tetap. Secara terbuka keduanya saling memerlukan, dan oleh karena itu keduanya selalu berusaha mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini merupakan konflik antara dua komponen yang bersifat teleologis. Kedua komponen yang selalu berada dalam bayangan konflik, menjadi simbol ketertiban masyarakat. Dalam rumah tangga terdapat dua komponen laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga maupun melahirkan keturunan sebagai hasil tujuan teleologis.

Pandangan kosmogini yang bersifat rangkap ini, mewarnai segenap pandangan dan perilaku manusia dalam masyarakat dan kebudayaan bersangkutan. Kepemimpinan dalam pola ini diwarnai oleh semangat *kesepakatan* yang dapat mengantarkan masyarakat kepada tujuan-tujuannya sebagai hasil kesepakatan komponen-komponen bersangkutan. Ia terbuka untuk argumentasi dan di dalamnya dikembangkan keseimbangan dalam proses pengendalian kekuasaan berupa mekanisme bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan.

Dalam perinciannya Mochtar Naim berpendapat bahwa pola M bersifat demokratis, egaliter dan menghargai kritik serta pendapat yang berbeda, sentri-fugal, desentralisasi dan informal. Selain ciri-ciri itu Mochtar Naim melengkapinya dengan mengatakan bahwa dalam pola M ini kelihatan praktek-praktek kekuasaan yang horizontal, poliformalistis, populistis, komunalistis,

modernistis, kasual, sintetis, monoteistis, rasional, pragmatis dan sebagainya. Pola M itu nyata dijalankan selama masa sepuluh tahun pertama dari usia Republik Indonesia.

Pola J dan pola M seperti dikemukakan oleh Mochtar Naim tersebut sesungguhnya masih dapat dilengkapi dengan satu pola lagi. Pola itu secara umum terdapat dan berlaku dalam kepemimpinan masyarakat wilayah kepulauan di Indonesia Bagian Timur. Pola kepemimpinan seperti itu dinamakan *Pola Kapitan Laut*. Di Sulawesi Selatan dinamakan pola Kepemimpinan *Punggawa-Sawi (PS)*.

Pola Punggawa-Sawi (PS) yang juga dapat disebut *Pola Kapitan Laut* adalah satu jenis pola kepemimpinan yang terdapat pada negeri-negeri maritim Nusantara "tempo doeloe". Seseorang menduduki jabatan kepemimpinan tertentu berdasarkan kemampuan yang ditimbanya dari pengalaman-pengalaman profesional dalam fungsi-fungsi tertentu. Seseorang untuk menjadi *Punggawa* (pemimpin pekerjaan), harus memiliki *sawi* (anak semang atau pengikut). Tangga ke arah mencapai kedudukan menjadi *punggawa* adalah kemampuan profesional melakukan suatu pekerjaan dan memimpin pekerjaan itu sehingga terselenggara, bersama dengan sejumlah orang yang menjadi *sawinya* atau anak buah sebagai *kerabat kerja*. Tingkat legitimasi kepemimpinan didasarkan pada kemampuan nyata melakukan pekerjaan dan memimpin pelaksanaan suatu pekerjaan.

Orientasi kepemimpinannya adalah pada kemampuan dan keunggulan mental spiritual dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pola ini mengembangkan pandangan *keteladanan* sebagai rujukan bagi penggantian dan penerusannya, oleh generasi yang pada waktunya

harus melakukan penerimaan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Pola kepemimpinan PS ini selain dijadikan rujukan dalam kepemimpinan negeri, wilayah, atau pulau pemukiman, juga dipergunakan dalam perusahaan-perusahaan dan terutama di perahu-perahu niaga. Pimpinan usaha dalam perahu niaga disebut nakhoda atau kapitan atau punggawa, dan anak semangnya disebut *sawi*.

Semangat esensial yang menjiwai persekutuan, masyarakat atau komunitas itu ialah semangat *kekerabatan* dan *kooptasi*. Kekkerabatan sifatnya lebih fungsional. Kecakapan diwariskan kepada angkatan muda dalam lingkungan kerabat kerja (*sawi*). Kekeluargaan lebih bersifat ketemurunan dan pewarisan menurut garis keturunan sedarah (*genealogis*). Dalam kekerabatan, penetapan suksesi atau pemimpin ditentukan oleh *pemimpin tua secara kooptasi* (tunjukan) dari sejumlah orang dalam generasi muda yang dipersiapkan, sesuai prestasi dan kemampuan yang telah ditunjukkannya. Seorang dari calon-calon itulah yang akan ditunjuk/dipilih.

Pentingnya semua pola itu sesuai dengan keperluan dalam masyarakat. Dalam arti bahwa setiap pola itu dapat memberi sumbangan terhadap kepemimpinan yang diperlukan oleh Negara dan Bangsa Indonesia. Ketiga pola tersebut secara umum memiliki esensi yang perlu dipelihara dalam warna kepemimpinan bangsa Indonesia:

1. *Pola Paku Buana* memiliki esensi *kekokohan*, kecermatan dan konservasi yang kuat. Dengan satu kata dirumuskan ketelatenan.
2. *Pola Menjinjing Alam* memiliki sifat esensial berupa keterbukaan, keluwesan dan solidaritas yang amat didambakan. Dengan satu kata ia dapat dirumuskan ke

dalam kata *kebebasan*.

3. *Pola Kapitan Laut* memiliki esensi dinamika dan profesionalisasi yang fungsional. Dirumuskan dalam satu kata *dinamika*.

Ketelatenan, kebebasan dan dinamika yang menjadi esensi ketiga Pola Kepemimpinan Nusantara itu dapat menjadi paduan yang amat khas bagi kepemimpinan bangsa Indonesia yang diharapkan dapat dengan sukses membawa bangsa Indonesia ke arah kejayaan. Ketiga pola kepemimpinan itu terdapat di seluruh wilayah Nusantara. Setiap pola bukan milik suatu wilayah secara khusus. Sebagai pola umum ia menjadi acuan pemikiran bagi kemungkinan penyelenggaraannya di mana-mana, baik dalam lapangan politik maupun dalam lapangan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Kalau identifikasi Mochtar Naim itu benar, maka apa yang diketemukannya bahwa Pola M itu telah dimulai pada sepuluh tahun pertama usia Republik Indonesia. Kita dapat mengingatkannya bahwa pola itu mengalami kegagalan dan keadaan yang tragis. Kenyataan menunjukkan telah berlangsungnya pelampauan batas-batas *kebebasan*, sehingga menimbulkan keadaan yang *anarkis*. Tentu saja suasana yang ditimbulkannya amat berbahaya bagi kelanjutan hidup Republik Indonesia.

Maka apabila terjadi pengalihan pola kepemimpinan dari Pola M ke Pola J, hal itu dapat dipandang sebagai tindakan penyelamatan. Tentu saja sebagai tindakan penyelamatan, ia diharapkan tidak akan menjadi *pola tetap* untuk diperlakukan secara abadi untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Indonesia memiliki hakikat esensial yang khas. Sebagai Negara Kepulauan dengan kebhinekaan yang amat kaya, maka warna kebhinekaan itu juga perlu dipelihara

untuk menyelamatkan ketunggalan Indonesia.

Menggunakan satu pola saja diantara pola-pola lain yang ada, selalu akan berarti ancaman bagi integrasi bangsa. Padahal, integrasi ini seharusnya selalu menjadi acuan yang kuat bagi segenap kebijaksanaan pengembangan dan pembangunan bangsa untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat. Sebenarnya kesalahan yang telah terjadi dalam sejarah bukan terletak pada pola yang dijalankan secara aktual, melainkan pada soal *akseptasi* masyarakat yang diharuskan menggunakan pola itu.

Pola Umum Kepemimpinan dan Legitimasi

Dalam buku van Peursen⁴ disebut tentang perkembangan kebudayaan yang mendapat dorongan dari beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. *Alam pikiran mitis* yaitu alam pikiran yang menyatukan kosmos ke dalam kesatuan obyek dan subyek. Makro dan mikro kosmos berada dalam satu wahana. Kemauan subyek berada dalam kemauan obyek dan sebaliknya. Kesatuan serupa itu menciptakan keadaan-keadaan sinkretis. Kekuasaan menyatu dalam pemegang kekuasaan. Simbol-simbol kekuasaan yang berupa *regalia* (alat-alat kebesaran sesuatu kerajaan) dipandang sebagai legitimasi dari kekuasaan itu. Barang siapa menguasai alat-alat kebesaran itu, maka dialah yang menjadi pemilik kekuasaan yang melekat padanya. Rupa-rupanya awal terjadinya pola kepemimpinan *Paku*

Buana itu sejalan dengan keadaan yang didorong oleh alam pikiran *mitis* itu. Dalam rumusan *kemanunggalan kawula-gusti* dan *sabdo pandita ratu*⁵ dapat dikatakan bahwa alam pikiran *mitis* itu menjadi rujukan segala kelakuan dalam kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa dan diterima oleh yang dikuasai sebagai keadaan yang sewajarnya, dan diterima sebagaimana adanya. Tak ada bantahan, apalagi perlawanan. Di sinilah sifat *sin-kretis* itu menyatakan diri dengan sejelas-jelasnya. Ia dimotori oleh semangat kehidupan yang menempatkan keselarasan, keseimbangan dan keserasian sebagai acuan yang terdepan dalam menangani segala komponen yang memiliki potensi saling berlawanan. Dalam pola kepemimpinan *Paku Buana* segala sesuatu dapat dikompromikan.

2. *Alam pikiran ontologis* yaitu alam pikiran yang memberikan kedudukan terpisah antara obyek dan subyek. Makro dan mikro kosmos menempati tempat masing-masing sebagai substansi yang berdiri sendiri. Obyek dengan subyek tidak terlebur menjadi satu, tetapi masing-masing menemukan sasaran yang bersifat sintetis dan bersasaran teleologis. Satu ikatan yang amat *luwes*, menjadikan suatu ikatan persekutuan yang lebih besar bersifat amat longgar dan terbuka untuk kebebasan masing-masing komponen yang mengikatkan diri dalam persekutuan besar. Pola kepemimpinan *Men-jinjing Alam* tampaknya amat dekat pada alam pikiran ontologis ini. Mulai dari terjadinya satuan-satuan kecil yang mengakui adanya hubungan dengan satu

⁴van Peursen, *Strategi*. Gambaran itu atas interpretasi saya ke dalam dunia politik yang berwatak sinkretis dan mitis, ontologis dan fungsional, yang diharapkan pada kenyataan-kenyataan sosial budaya di Indonesia.

⁵P.J. Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti* (Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, satu studi Filsafat, Terjemahan Dick Hartoko (Jakarta: P.T. Gramedia, 1990), 54 dst.

wadah berupa induk dari satuan-satuan kecil tersebut. Hubungan itu tidak menghapuskan eksistensi masing-masing sebagai subyek dan obyek. Masing-masing wilayah kecil berotonomi, bergerak sesuai dengan kodratnya sendiri yang terbimbing oleh pengakuan tentang adanya ikatan kesetiakawanan, yang membangun kekuatan solidaritas dalam kesatuan wilayah besar. Semakin kuat perkembangan kekuatan wilayah kecil berotonomi itu, semakin halus pula wujud ikatan terhadap wilayah gabungan. Kekuatan ikatan amat ditentukan oleh kemampuan memberikan pelayanan yang sama atas semua peserta dalam ikatan itu. Antara wilayah-wilayah kecil berotonomi itu dengan wadah ikatan besar, terjalin hubungan yang saling menentukan dan memberi kekuatan legitimasi bagi eksistensi masing-masing. Dari situ terjadi wadah yang luas dengan kesatuan-kesatuan kecil berotonomi, yang merasa terbimbing oleh satu solidaritas wilayah yang luas yang mengayomi semua komponen yang terikat didalam daerah/wilayah besar. Terasa selalu adanya dua komponen yang berada dalam keadaan berlawanan. Karena satu konflik yang inheren dalam kesatuan-kesatuan tersebut. Keadaan berlawanan itu selalu bersentuhan sehingga masing-masing menemukan sasaran yang hendak dicapainya. Kedua komponen berada dalam konflik itu karena kodrat keberadaannya yang secara teratur melakukan peranan persentuhan secara dialektis dan luwes, sehingga tidak saling menghilangkan. Pertemuan kedua komponen dalam interaksi mencapai tujuan *teleologis* tetap menghidupkan kedua komponen yang bersentuhan. Semangat sintetis dan keterbukaan yang didorong oleh sasaran *ontologis*, menyebabkan satu sintesa yang memeli-

hara komponen-komponen yang berinteraksi. Sebaliknya, semangat konflik yang bersasaran integrasi *teleologis*, selalu mengarah pada satu sasaran peningkatan kualitas komponen yang ikut dalam interaksi. Dalam interaksi demikian selalu terpelihara keluwesan dan keterbukaan sebagai kodratnya yang hakiki.

3. *Alam Pikiran Fungsional* yaitu alam pikiran yang memberikan kedudukan pada hubungan fungsional antara obyek dengan subyek. Makro kosmos terpisah dari mikro kosmos, akan tetapi dalam kedudukan terpisah itu terdapat jalinan yang menghubungkan keduanya. Hubungan itu berupa hubungan yang saling memerlukan dan saling menentukan eksistensi masing-masing. Alam pikiran fungsional ini secara teoretis dekat sekali pada pola kepemimpinan *Kapitan Laut* atau *Pola Punggawasawi*. Keterhubungan obyek dengan subyek dibawa oleh peranan masing-masing dengan fungsi-fungsi yang saling memerlukan. Peranan-peranan itulah yang menghubungkan secara dinamis arah pencapaian sasaran yang dikandung oleh fungsi-fungsi yang melekat pada kedudukan setiap komponen fungsional. Pola kepemimpinan *Punggawasawi* menempatkan kualitas komponen untuk menemukan legitimasi bagi terjadinya kepemimpinan itu. Setiap fungsi secara kuat dijalankan untuk menggerakkan mekanisme sistem fungsional secara tepat. Proses mobilitas vertikal berjalan dengan seleksi yang cermat, dan di sinilah pangkal dinamika kehidupan lembaga, karena terdorong oleh persaingan yang semakin keras untuk sampai pada pimpinan puncak. Penghargaan pada keahlian dan senioritas memegang peranan penting dalam seleksi kepemimpinan. Apa yang dilukiskan secara artifisial mengenai berbagai kesetaraan

seperti di atas, bahwa pola kepemimpinan *Paku Buana* amat dipengaruhi oleh alam pikiran mitis, pola kepemimpinan *Manjinjing Alam* dekat sekali pada alam pikiran ontologis, dan pola kepemimpinan *Kapitan Laut* terbimbing oleh alam pikiran fungsional, semata-mata untuk menunjukkan adanya kecenderungan. Ketiga pola kepemimpinan itu dalam penyelenggaraannya sedikit banyak dipengaruhi ketiga alam pikiran tersebut.

Tidak dapat disangkal bahwa pola-pola kepemimpinan *Paku Buana*, *Manjinjing Alam* dan *Kapitan Laut* memiliki warna dari pemikiran mitis, ontologis, dan fungsional. Tetapi kekuatan warna-warna pada masing-masing pola niscaya berbeda adanya. Keras atau lunaknya warna itu tergantung pada cara terbentuknya ikatan kebersamaan satuan masyarakat yang bersangkutan. Adapun ikatan kebersamaan dari satuan masyarakat itu dapat diamati melalui jenis-jenis ikatan antara semua warga persekutuan, yaitu:

1. *Ikatan genealogis* ialah suatu persekutuan hidup yang hubungan keakraban atau kebersamaannya didasarkan pada hubungan darah (genealogis). Pada umumnya hubungan genealogis menjadi dasar yang kuat untuk penataan persekutuan hidup kecil yang disebut keluarga. Satuan hidup keluarga itu dalam persekutuan hidup kecil yang menempati wilayah seperti *desa*, *kampung* atau *wanuwa*, memiliki semacam kepercayaan bahwa ada *cikal-bakal* persekutuan yang disebut *nenek-moyang* yang selalu mengawasi tata tertib (adat istiadat) kehidupan dalam persekutuan hidup itu. Pimpinan persekutuan yang dipilih atau diangkat adalah seseorang dari garis keturunan yang tertua sebagai pedoman penentuan keabsahan menjadi pemimpin. Pada pola kepemimpinan *Paku Buana*, masalah keturunan

genealogis banyak menentukan pengambilan calon-calon pemimpin.

2. *Ikatan teritorial* ialah suatu persekutuan hidup yang dibangun menurut ikatan kewilayahan (teritorial). Di dalam persekutuan hidup teritorial terdapat keserbaneekaan warga. Keserbaneekaan warga itu menuntut adanya otonomi pelayanan untuk masing-masing kelompok warga yang terikat dalam satu teritorial. Pucuk pimpinan persekutuan selalu diharapkan memiliki kemampuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah/teritorial yang luas dengan mengandalkan keluwesan, keterbukaan dan kebersamaan. Ikatan teritorial ini kelihatannya kuat terdapat pada pola kepemimpinan *Manjinjing Alam*. Karena sifat warganya heterogen, maka sifat otonomi dan keluwesan serta keterbukaannya menjadi sifat yang amat jelas (harus) dipelihara dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas yang menjadi kekuatan ikatan itu.

3. *Ikatan Fungsional* adalah suatu persekutuan hidup yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan fungsional (spasial).⁶ Kewargaan dalam satuan-satuan masyarakat atau komunitas ditentukan oleh fungsi-fungsi atau peranan profesional yang sama dari setiap orang dalam komunitas itu. Kewargaan dalam komunitas nelayan, dalam komunitas pedagang berpekerjaan atau komunitas fungsional lainnya ditentukan oleh kemampuan profesional setiap warga komunitas itu. Rupa-rupanya ikatan fungsional ini menjadi faktor

⁶Mattulada, "Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia," dalam *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), 3 dst. Ikatan Fungsional diartikan sebagai persekutuan hidup yang dibentuk dengan sengaja, seperti pada organisasi buruh dan persatuan guru dalam masyarakat modern.

pendorong yang kuat terhadap lahirnya pola kepemimpinan *Kapitan Laut* atau *Punggawasawi*. Karena setiap warga memiliki kedudukan menurut fungsi dan kemampuan profesional, maka terjadi persaingan dan seleksi untuk kenaikan jenjang kepemimpinan yang teliti dan teratur. Dinamika sosial terjadi pada semua lapangan dan tingkatan untuk menemukan pemimpin yang tepat bagi persekutuan atau komunitas masing-masing.

Memang tidak terdapat korelasi yang tetap antara faktor-faktor ikatan terjadinya persekutuan hidup genealogis, teritorial dan fungsional dengan pola-pola kepemimpinan *Paku Buana*, *Manjinging Alam* dan *Kapitan Laut*, namun kecenderungan masing-masing dalam menerima pengaruh dari faktor-faktor itu sangat terbuka untuk identifikasi secara umum. Juga hal itu kelihatan pada cara penyelenggaraan kepemimpinan seperti diuraikan di atas. Saling memberi pengaruh itulah yang mewarnai dan memberikan kecenderungan hubungan dalam pasangan masing-masing, dengan warna yang lebih keras dibandingkan dengan pasangan lainnya.

Penutup

Dewasa ini upaya-upaya untuk menemukan potensi kepemimpinan yang bersumber dari pemikiran tentang kepemimpinan tradisional dalam masyarakat Nusantara mungkin dapat dipandang sebagai kegiatan strategis. Alasan strategisnya terletak pada dua pola pemikiran ilmiah yaitu:

1. *Pemikiran rasional* yang memikirkan dan memetakan dalam pandangan satu Republik Indonesia Modern dengan konstitusi dan lembaga-lembaga kenegaraan yang memiliki keandalan berdasarkan petun-

juk yang diperoleh dari negara-negara modern. Secara deduktif keadaan itu memang benar. Tetapi kebenarannya hanya ada dalam pemikiran atau idea dan dijadikan cita-cita tentang satu Republik Indonesia yang seperti dalam pikiran itu. Keadaan seperti itu secara strategis memang betul, dan dapat dijadikan pangkalan untuk perencanaan masa depan. Masa depan yang jauh atau dekat ditentukan oleh keadaan Republik Indonesia sekarang, yaitu dalam keadaan sebagaimana adanya.

2. *Pemikiran empiris* yang melihat masalah sebagaimana adanya, dalam keadaan empiris dengan menggunakan metode induksi. Dalam hal memikirkan Republik Indonesia menurut pemikiran rasional dan metode deduktif, ternyata masih amat jauh dari jangkauan masa kini dalam pemikiran empiris.

Tentu saja Republik Indonesia di masa depan adalah satu negara merdeka yang modern, demokratis, bekerja ke arah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berkeadilan seperti yang dicita-citakan. Seperti disebut dalam Undang-Undang Dasar dan filsafat Pancasila, hal itu merupakan tujuan di masa depan. Suatu negara boleh saja disebut negara merdeka dan berdaulat. Tetapi dalam satu negara merdeka, belum tentu dengan sendirinya terdapat kebebasan sebagai wujud terdalam dari hak-hak asasi umat manusia, yaitu bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari penindasan dan lain-lain. Walaupun ada jaminan secara konstitusional bahwa ada demokrasi, tetapi tidak dengan sendirinya demokrasi itu terselenggara seperti yang dicita-citakan. Walaupun disebutkan adanya *kedaulatan rakyat*, tetapi interpretasi siapa rakyat yang berdaulat itu bisa macam-macam adanya.

Dalam hal Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, kebebasan itu masih harus diperjuangkan dengan kuatnya. Bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari penindasan, rupanya masih terdapat dalam dunia *angan-angan*. Adanya kedaulatan rakyat memang diakui dalam UUD 1945. Tetapi rakyat yang berdaulat itu ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tampaknya memang ada demokrasi, karena ada lembaga tinggi negara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Sepertinya Republik Indonesia adalah negara hukum karena disebut demikian dalam UUD 1945. Meskipun demikian, sesungguhnya rakyat belum memiliki kedaulatan itu. Rakyat yang sebenarnya belum memiliki kebebasan dari rasa takut, kemiskinan, penindasan dan sebagainya. Rakyat yang berdaulat, memiliki kualitas tertentu untuk (mampu) melakukan kewajibannya sebagai warga negara dan mendapatkan hak-haknya.

Kalau kita menggunakan kriteria suatu negara merdeka dan berdaulat, negara tersebut harus mempunyai wilayah yang jelas, rakyat, dan pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya, maka negara kita Republik Indonesia ini memenuhi semua kriteria itu. Hal ini merupakan kenyataan-kenyataan dalam pemikiran empiris.

Karena itu, kita masih harus menghadapi sekian banyak problem. Problem itu ada, kalau yang *diharapkan* tidak sesuai dengan apa yang ada *dalam kenyataan*. Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu diadakan kegiatan pembangunan yang bersifat semesta dan berencana. Pembangunan dua-puluh lima tahun tahap pertama Orde Baru telah berusaha mendorong, mempersempit dan mengurangi jarak antara harapan dan kenyataan yang menjadi masalah itu. Ber-

bagai keberhasilan pembangunan terutama dalam bangunan fisik terasa melegakan. Tetapi tampaknya belum ada keberhasilan pembangunan sikap mental dalam rangka *Nation and Character Building*. Di sinilah letak problemnya, karena adanya kenyataan yang dapat dikatakan belum beranjak dari keadaannya yang "tetap tidak sesuai dengan pemikiran strategis" itu.

Rakyat kita yang 80% menjadi penghuni desa-desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 belum dapat sepenuhnya ikut menikmati hasil kemerdekaan. Kebanyakan mereka belum siap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dari suatu negara merdeka dan berdaulat. Karena itu pula, dengan sendirinya mereka belum mampu memahami hak-hak yang dapat digunakannya untuk mendukung terwujudnya negara hukum, yang demokratis dan bersifat kerakyatan.

Maka dari sudut pandangan inilah terletak makna strategis dari upaya mempelajari potensi kepemimpinan masyarakat tradisional di Indonesia. Pola-pola kepemimpinan yang dikemukakan di atas sebagai pandangan teoretis mungkin akan berguna bagi upaya untuk menemukan pola kepemimpinan yang lebih tepat guna menumbuhkan peran serta (partisipasi) rakyat dalam mencapai kebebasan-kebebasan yang menjadi bagian dari hak-hak asasinya.

Pola kepemimpinan yang memiliki esensi *ketelatenan* dari pola Paku Buana, *keluwesan* dari pola Manjinging Alam, dan *dinamika* dari pola Kapitan Laut dapat menjadi pola kepemimpinan nasional yang diharapkan dapat membawa kenyataan-kenyataan dewasa ini mendekati cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi abad XXI yang masih penuh dengan tanda tanya.